



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI KE
PEMERINTAH KOTA BOGOR, JAWA BARAT
28 April 2017

A. PENDAHULUAN

1. Komisi I DPR RI, Dalam rangka memasuki Reses Masa Sidang kali ini, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
2. Sebagaimana diketahui, Komisi I DPR-RI membidangi kebijakan luar negeri, pertahanan, intelijen, serta komunikasi – informasi. Oleh karenanya, kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi dan wewenang DPR RI yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran, terutama sekali dalam bidang kebijakan Luar Negeri terkait perjanjian internasional ataupun kerjasama seperti *Sister City*.
3. Dalam daftar perjanjian internasional yang kami terima dari mitra Komisi I, yakni Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) terdapat beberapa perjanjian antara Kota Bogor dengan beberapa kota negara sahabat. Diantaranya yang tercantum dan menjadi atensi utama adalah:
 - a. *Letter of Intent (LoI)* antara Kota Bogor dengan Kota Saint Louis, Missouri, Amerika Serikat mengenai pembentukan kerjasama kota bersahabat (*the establishment of friendship city cooperation*), 19-05-2004.
 - b. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Departemen Pertanian Republik Indonesia (Deptan RI) dan Pemerintah Australia terkait dengan perpanjangan proyek kerjasama dalam penelitian dan pengembangan di

- Bidang Ilmu Kedokteran Hemat di Institut Penelitian Penyakit Hewan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agrikultur Bogor, 02-10-1986.
- c. *Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pusat koordinasi kawasan untuk penelitian dan pengembangan biji-bijian, kacang-kacangan, akar dan umbi tanaman (CGPRT) hutan tropis Asia dan Pasifik di Bogor, Indonesia, 29-04-1981.
 - d. MoU antara Pemri dan Pemerintah Australia tentang proyek kerjasama dalam penelitian dan pengembangan di bidang ilmu kedokteran hewan pada institute penelitian penyakit hewan Bogor, badan penelitian dan pengembangan agrikultur (ATA-219), 22-07-1980.
4. Selain itu juga Komisi I menyerap informasi lain bahwa kota Bogor juga memiliki perjanjian internasional, *Sister City*, dengan beberapa kota lain diantaranya:
- a. Saint Louis, Missouri, Amerika Serikat
 - b. Lloró, Kolombia,
 - c. Gödöllő, Hungaria, dan
 - d. Salak Tinggi, Malaysia.
 - e. Tainan, Taiwan.
 - f. Chongzuo Guangxi China.
5. Maka, berdasarkan data tersebut, Komisi I hendak mendalami perkembangan implementasi dari perjanjian internasional dan kerjasama *Sister City* tersebut, misalnya terkait dengan statusnya apakah masih berlanjut atau sudah berhenti. Penting pula untuk kami memastikan bagaimana kesepakatan tersebut memberikan kebermanfaatannya bagi kedua pihak, terutama sekali bagi pihak Indonesia, dalam hal ini kota dan warga Bogor.

B. PEMBAHASAN

Paparan Oleh Walikota, Dr Bima Arya Sugiarto

B.1. Tiga Variable Kesuksesan Pemkot Bogor

- Basis variable sekaligus indikator kesuksesan kebijakan Pemkot Bogor ada tiga: Heritage, Green, dan Smart.

- Bogor memperkuat identitas (*competitive advantage*) sebagai Kota pusaka, ibukota sunda pakuan padjajaran. Bukan bandung, bekasi, tapi bogor. Banyak peninggalan; Kota pertama di belahan dunia timur, 87 hektar, kontru kota sangat hikau; Smart city, kota dengan kampus besar di kota Bogor.
- Ketiga variable ini juga diberlakukan dalam konteks anggaran. RPJMD Kota Bogor termasuk kerjasama Luar Negeri, semua disusun berdasarkan skala prioritas atas basis tiga variable tersebut.
- Dalam kebijakan pelayanan publik Pemkot Bogor fokus pada beberapa hal: Penataan transportasi, urusan angkot. Kalau masalah ini belum kelar maka belum selesai; Pelayanan Kebersihan, Pemberdayaan PKL, RTH dan pedestrian, Reformasi birokrasi, dan Penanggulangan kemiskinan.

B.2. Kerjasama LN

- Kerjasama LN pun akan dikembalikan ke tiga variable dasar dengan ragam derivasi kebijakannya.
- Dalam hal kerjasama LN, Pemkot Bogor memberikan catatan bahwa peran pemerintah pusat, dari mulai BKPN, Kemlu, Kedubes, sangat minim. Kecuali kita inisiatif lalu jaringan terbuka
- Ada yang warisan, ada yang baru.
- Empat forum besar international yang diikuti Pemkot Bogor:
 - Citynet
 - Mayor for peace
 - ICLEI – lingkungan hidup
 - UCLG ASPAC (40 juta setahun)
- Intensitas sangat tinggi, kalau diikuti agendanya nyaris setiap pekan. Dari Indonesia tidak banyak, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Banda Aceh. Berpotensi sangat sinergis, terlebih apabila lebih dibantu pemerintah.

B.3. Pertukaran Best Practice, Technical Assistance, dan Kerjasama

Dalam Pertemuan di UCLG ASPAC, Manila, Filipina

- Keanggotaan dalam forum internasional adalah bagian dari peran aktif dan kepedulian kota Bogor terhadap isu-isu internasional seperti perdamaian atau perubahan iklim.
- Benefit yang paling dirasakan ada pada pertukaran best practice, serta jaringan bantuan.

Kerjasama dengan Beberapa Kota Dunia

- Kerjasama dengan Seoul terjalin, tapi tidak ada dukungan KBRI. Itu sangat lambat.
- Kerjasama teknis antara kota Bogor dengan Seoul dalam membantu percepatan dalam mendorong Bogor sebagai kota cerdas.
- Smart City: ada command center yang mengatur transportasi kota. Niatnya juara, bantu satu dua kali pelatihan lalu ada barang yang dijual.
- Kerjasama Friendship of City antara kota Bogor dengan Kisarazu dengan sejumlah komitmen kerjasama bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pertanian, dan kesehatan; Kebutuhan perawat bagi kota yang menua, skill bahasa; Kualitas pertanian terbaik di dunia. Potensi di Sukabumi; Kesehatan ingin membantu mengirimkan ambulance.

Dalam Pertemuan di ICLEI

- ICLEI – bantuan dari ICLEI berupa pendampingan penghitungan emisi gas rumah kaca dan pembuatan kajian lingkungan hidup strategis (KHLS) pemberian *technical assistance* berupa training, conference, dan seminar di dalam dan luar negeri serta pembangunan jalur sepeda senilai 1,5 milyar.
- Hiroshima datang. Gubernur Hiroshima termuda kedua di Jepang, 42, memberikan master plan. Kedua, melatih aktivis sampah, ibu-ibu PKK, bank sampah, dikirim ke sana. Ketiga, motivasi. Anda harus optimis, punya struktur sosial RT RW peninggalan Jepang. 5000 yen = 6 miliar rupiah bantuan dari Hiroshima

- Bantuan dari NIES Jepang berupa alat monitoring penggunaan energi di beberapa lokasi di Bogor, diantaranya kantor pemerintahan, mall, dan sekolah.
- Perancis hadir melalui AFD (lembaga nirlaba bidang Lingkungan Hidup) berupa Technical Assistance, pendampingan dan kajian climate change action plan.

Kerjasama dengan PPI di Tiga Kota Dunia

- Kerjasama PPI tiga kota dunia: Jepang, Paris, dan London.
- PPI Paris. Setiap forum ini, peran embassy, sangat minim. Disuguhi hanya Orange Juice dan Chiki.

Potensi Pengembangan Program

- Dalam halantisipasi permasalahan TKA Ilegal, Pemkot Bogor fokus pada penguatan program dan kegiatan posko siskamling. Pertahanan rakyat semesta, lurah-camat-dukcakil. Imigrasi sudah sangat canggih.
- Ide *Bogor Economic Summit* dapat dipertimbangkan, sehingga dalam satu tempat ada tawaran ini kebutuhan, harga, dan itu mejanya. Lembaganya selama ini memang tidak ada, hanya ada Badan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap.
- Kebun Raya lari 200 km, 100 km, 50 km, 20 km, 10 km. Bogor as *city of runner*.
- PAD. Sejak pedestrian dibangun 500.000 orang. Occupancy rate naik. Taman PAD, pedestrian PAD. Sehat, bergerak, kota cantik, dan
- Sandal marathon. Start 2 – 7 selesai. Pada 9 Juli.
- Green City sudah survey kemana-mana, di Korea dan Jepang. Bristol.

Evaluasi Sister City

- Program Sister City kurang efektif, karena besarnya *Vested Interest* dari elit sehingga *Trickledown Effect* tidak sampai ke pemangku kebijakan (stakeholders). Kemudian rumit secara sistem, karena belum terintegrasi.
- Bukan sister city yang efektif, tapi langsung program sampah dengan Hiroshima, street lighting. Sister city lebih seremonial elit. Harus ada desk di Kemlu atau BKPM. Daftar sister city apa saja lalu dimonitor. Lalu apa yang dapat dievaluasi.

- Selama ini tidak ada monitoring dan evaluasi. Kemudian sampai mana? Kalau tidak dihentikan atau diperbaharui.
- Lebih efektif masuk ke program kongkrit seperti: Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman dan Ruang Terbuka Hijau. Dampaknya: Tingkat hunian hotel savero di tahun 2016 mencapai 78% naik sekitar 8% dibandingkan tingkat hunian 2015. Tingkat hunian hotel salak di tahun 2016 naik 7%

Persoalan Transportasi

- Motor belum ada payung hukum. Oleh sebab itu, Pemda berinisiatif demi ketertiban diskresi buat perwali soal hukum.
- Nambah armada penjajahan model baru tanpa ada aturan mengendalikan.
- Sampai sekarang owner nya tidak ada yang hadir. Tidak ada pula komitmen pemerintah pusat untuk membuat grand design transporatasi terintegrasi masa depan.
- Kita sangat support. PAD 400 M. bersepakat naikkan PAD.
- Membutuhkan banyak sekali dukungan dana, terlebih menjadi tempat tinggal Pak Presiden.
- Evaluasi Masyarakat: Layanan Angkutan Umum; Sangat baik 6,3; Baik 47,5; Buruk 35,5; Sangat buruk 4,8; TT/TJ 6. Sementara penilaian masyarakat terhadap jumlah angkot: Sangat memadai 34,8; Cukup memadai 46,8; Kurang memadai 14,8; Tidak memadai 1,0; TT/TJ 2,8

Teknologi Mengatur

- Penumpukan tidak boleh tapi solusinya harus berbasis teknologi, Kominfo.
- Online tidak boleh mangkal, kalau kumpul di-*suspend*.
- Jangan nambah dulu. Ini permintaan OL juga, karena tidak menambah saingan.
- Tidak kalah bahaya dengan Islam Radikal.

C. KESIMPULAN

1. Komisi I melihat perlunya pembicaraan dengan Kemlu dan Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri dalam rangka mengevaluasi dan merumuskan kebijakan ke depan agar dukungan Pemerintah terhadap Pemda dalam kerjasama internasional lebih ditingkatkan.
2. Komisi I melihat perlunya mengevaluasi bersama dengan Kemlu dan Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri terkait program *Sister City* yang kurang efektif dan merumuskan bersama kebijakan ke depan agar secara sistem terintegrasi.
3. Komisi I melihat perlunya Kemlu mendorong program kerjasama internasional di luar *Sister City*, terutama yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik secara langsung. Sekaligus, mendorong hadirnya desk di Kemlu yang melakukan monitoring dan evaluasi capaian *Sister City*.
4. Komisi I melihat perlunya membicarakan bersama dengan Kemkominfo persoalan Transportasi dengan solusi kebijakan pengaturan berbasis teknologi.